

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-undang Dasar* Tahun 1945.

_____, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU Nomor 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN 2043.

_____, *Undang-Undang tentang Kehutanan*, UU Nomor 41 Tahun 1999, LN No. 167, TLN 3888.

_____, *Undang-undang tentang Cipta Kerja*, UU Nomor 11 Tahun 2020, LN No. 245, TLN 6573.

_____, *Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU Nomor 12 Tahun 2011. LN Nomor 82 Tahun 2011, TLN 5234.

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*, PP Nomor 24 Tahun 1997.

_____, *Peraturan Presiden tentang Badan Pertanahan Nasional* Nomor 10 Tahun 2006.

_____, *Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat*, Permen Agraria Nomor 5 Tahun 1999.

_____, *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penatasahaan* Nomor 19 Tahun 2016.

_____, *Peraturan Menteri Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tatacara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat* Nomor 18 Tahun 2019.

_____, *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Tanah Adat* Nomor 18 Tahun 2019.

_____, *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya* Nomor 16 Tahun 2008.

B. Buku

- Ari H. Gunawan. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Alfons, Maria. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Universitas Brawijaya, 2010.
- Elvriadi, *Sebuah Kitab Hutan Untuk Negeri Gundul Mereguk Kearifan Tetua Kampar*. Pekanbaru: Suska Perss, 2007.
- Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Haq, Hilman Syahrial. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Klaten: Lakeisha, 2019.
- K Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Karya Agung, 2005.
- Limbong, Bernhard. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2015.
- Marshall Romney B & Paul John Steinbart. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Marhijanto Bambang, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muchsin, *Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Varia Peradilan IKAHI, 2006.
- Nasution Bahder Johan , *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

- Prof. Dr. I Gede A. B. Wiranata, S.H., M.H., *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Peursen, Van. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Kanisus, 1976.
- Rendra. *Mempertimbangkan Tradisi*. Jakarta: PT. Gramedia, 1983.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Rasjidi, Lili, Putra I.B Wyasa. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993.
- S, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2009.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan hak-hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Soepoemo, *Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993.
- Sudiyat, Iman. *Hak Adat Sketsa Azas*. Yogyakarta: liberty, 1981.
- Simarmata, R. *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta:UNDP, 2006.
- Salle, A. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Total Media, 2007.
- Siregar, Ansari. *Pendaftaran Tanah Kepastian Hak*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011.
- Saefudin, dan Ammidhan. *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Komnas HAM, 2006.
- Supriyadi, Bambang Eko. *Hukum Agraria Kehutanan Aspek hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soekanto, *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 1993.
- Suyono Ariyono, dan Aminuddin Siregar. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Safa'at, Rachmad. *Negara, masyarakat adat dan kearifan lokal*. Malang: In-Trans Pub, 2008.

Wignjodipuro, Sorojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Yulipriyanto, H. *Biologi Tanah dan Strategi Pengolahannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

C. Lain-Lain

Arif Rahmadi, *Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan di Papua*, Jurnal Tunas Agraria Vol. 5 No. 1.

Anna Bela Morizcha, *Dampak Investasi Perkebunan Terhadap Masyarakat Adat Pemilik Tanah Hak Ulayat (STUDI KASUS SENKETA MASYARAKAT HUKUM ADAT UMALULU KABUPATEN SUMBA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)*, Jurnal Hukum Visio Justisia Volume 1, Nomor 1, Juli 2021, <https://ojs.uph.edu/index.php/VJ/article/download/3801/pdf>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021.

Ayomi Amindoni, *Masyarakat adat Besipae di NTT yang 'digusur' dari hutan adat Pubabu: Anak-anak dan perempuan 'trauma' dan 'hidup di bawah pohon'*, <https://www.bbc.com>, diakses pada tanggal 26 November 2021.

Burhanuddin Afid, <https://afidburhanuddin.wordpress.com>.: diakses pada tanggal 3 Maret 2021.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa, Cetakan Pertama Edisi 4*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Desa Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, <http://www.riauonline.com/berita/peristiwa/pelalawan/warga-gunung-sahilan-tuntut-rapp-angkat-kaki-dari-kampar.html>, diakses pada tanggal 26 November 2021.

Hukum Click HARS&PARTNERS LAW OFFICE, *Tanah Adat*, <https://hukumclick.wordpress.com/2017/08/31/tanah-adat/> diakses pada tanggal 3 Maret 2021.

- Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, Februari 2012.
- Jasmir, *Pengembalian Status Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha di Indonesia*, *Jurnal SOUMATERA LAW REVIEW* Vol. 1 No. 1 Tahun 2018.
- Koesnoe, H. Moh. *Kapita Selekta Hukum Adat Suatu Pemikiran Baru*. Jakarta: Varia Peradilan, IKAHI, 2002.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pelaksanaan, <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses pada 14 Desember 2022.
- Liga Rahayu, Problematika Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Kabupaten Kampar, <https://media.neliti.com/media/publications/31263-ID-problematika-penyelesaian-konflik-tanah-ulayat-masyarakat-adat-di-kabupaten-kamp.pdf>, diakses pada 2 Desember 2022.
- Mustafa Silalahi, "Habis Manis Marapu Dibuang," <https://majalah.tempo.co/read/hukum/161528/begini-konflik-penghayat-marapu-dengan-perusahaan-milikorang-terkaya-di-indonesia>, diakses pada tanggal 25 Desember 2021.
- PETITA: *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas: Antara Teori Reception In Complexu, Teori Receptie, dan Teori Receptio A Contrario*, Volume 2, 2017.
- Riau Universitas, *Pengertian Persatuan dan Kesatuan*, tersedia di : <https://belajargiat.id/persatuan-dan-kesatuan/>. diakses tanggal 22 Desember 2020.
- Raden Ariyo Wicaksono, *Konflik Panjang Masyarakat Adat Pubabu-Besipae dan Pemerintah NTT*, diakses pada tanggal 20 Desember 2021.
- Suwitra, I Made. "Konsep Komunal Religius Sebagai Bahan Utama Dalam Pembentukan UUPA Dan Dampaknya Terhadap Penguasaan Tanah Adat, Bali: Jurnal Perspektif, 2010.
- Tempo, "Pahit Tebu Masyarakat Umalulu," <https://majalah.tempo.co/read/opini/161513/editorial-konflik-masyarakat-umalulu>

adat-di-sumba-timur-versus-cucuperusahaan-djarum-dan-wings, diakses pada tanggal 25 Desember 2021

Venan Haryanto, Klaim Pemprov NTT Atas Hutan Adat Pubabu, Menafikan Konflik yang Belum Selesai dengan Warga Besipae, <https://www.floresa.co/2022/10/28/klaim-pemprov-ntt-atas-hutan-adat-pubabu-menafikan-konflik-yang-belum-selesai-dengan-warga-besipae/>, diakses pada 2 Desember 2022.